



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**

PEDOMAN TEKNIS SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat)



INOVASI

SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan bantuan sosial merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Berbagai bentuk bantuan seperti bantuan tunai, sembako, bahan bangunan, program pemberdayaan, hingga bantuan pasca-bencana membutuhkan pengelolaan yang akurat, transparan, dan tepat sasaran. Namun, banyaknya jenis bantuan dan perbedaan sumber program dapat menimbulkan persoalan apabila data penerima, proses pengusulan, verifikasi, penyaluran, dan pelaporannya belum dikelola dalam satu sistem yang terpadu.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena data penerima bantuan sosial masih tersebar pada berbagai unit dan format. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya duplikasi penerima, ketidaktepatan sasaran, serta kesulitan dalam melihat keseluruhan cakupan program bantuan yang telah diterima masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan bantuan yang dilakukan secara manual pada masing-masing bidang membuat proses pemantauan status bantuan tidak dapat dilakukan secara terpusat. Akibatnya, pemerintah memerlukan waktu lebih panjang untuk melakukan verifikasi, menyusun laporan, serta mengevaluasi efektivitas program secara menyeluruh.

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri atas distrik, kampung, dan wilayah kepulauan juga menjadi tantangan dalam pemutakhiran data serta pemantauan penyaluran bantuan. Proses verifikasi lapangan dan pelaporan realisasi yang masih banyak dilakukan secara manual berpotensi memerlukan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Masyarakat juga menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi terpadu mengenai jenis bantuan, kriteria penerima, proses pengusulan, serta status realisasi bantuan yang tersedia. Situasi tersebut dapat memengaruhi transparansi layanan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat apabila informasi bantuan tidak mudah diperoleh.

Selain persoalan teknis, tuntutan reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat digitalisasi pelayanan publik. Pengelolaan bantuan sosial memerlukan sistem yang mampu menyatukan data lintas program, mendukung verifikasi kelayakan penerima, memantau proses penyaluran, serta menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan. Kebutuhan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan peningkatan akurasi data kemiskinan dan efektivitas program perlindungan sosial sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis data.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Yapen mengembangkan inovasi **SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat)**. Inovasi ini dirancang sebagai platform digital terpadu yang mengonsolidasikan berbagai proses bantuan sosial, mulai dari basis data penerima,

pengusulan, verifikasi, penetapan, pemantauan status, hingga pelaporan realisasi. Data penerima dari berbagai program disatukan dalam satu basis data dan dapat disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta data kependudukan untuk membantu proses validasi kelayakan dan mencegah duplikasi penerima lintas program.

SIBANTUMAS juga dirancang untuk memperkuat proses pelayanan melalui digitalisasi alur pengusulan dan verifikasi, pemantauan status bantuan secara *real-time*, serta penggunaan aplikasi mobile untuk mendukung verifikasi dan pelaporan lapangan. Bukti foto dan geotag digunakan sebagai bagian dari dokumentasi realisasi bantuan agar proses penyaluran lebih terlacak. Pada sisi masyarakat, portal transparansi publik dan fitur pencarian status bantuan berbasis NIK memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai bantuan yang sedang diproses maupun telah diterima. Pola tersebut menjadikan pelayanan bantuan sosial lebih terbuka sekaligus mengurangi ketergantungan pada mekanisme informasi manual.

Penerapan SIBANTUMAS sekaligus memperkuat pengelolaan data kemiskinan sebagai basis penyusunan kebijakan sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen. Basis data yang terus dimutakhirkan melalui verifikasi lapangan digital memungkinkan Dinas Sosial memperoleh informasi penerima yang lebih terintegrasi dan relevan dengan kondisi aktual. Dengan menggabungkan konsolidasi lintas program, digitalisasi layanan, pemantauan status bantuan, transparansi publik, serta analisis data, SIBANTUMAS diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi penyaluran, akuntabilitas program, serta mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih berbasis data.

B. TUJUAN

Inovasi SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat) dikembangkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan akurasi, keterpaduan, transparansi, dan efektivitas pengelolaan seluruh jenis bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini diarahkan agar data penerima bantuan yang sebelumnya tersebar di berbagai bidang dan format dapat dihimpun dalam satu basis data terpusat. Dengan pengelolaan data yang lebih terintegrasi, proses penetapan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih dan duplikasi penerima lintas program.

Selain memperkuat pengelolaan data, SIBANTUMAS juga bertujuan mempermudah dan mempercepat proses pengusulan, verifikasi, penetapan, hingga realisasi bantuan sosial. Digitalisasi formulir dan berkas, integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data kependudukan, serta penggunaan aplikasi mobile untuk verifikasi lapangan mendukung proses pelayanan yang lebih efisien. Pemanfaatan bukti foto dan geotag juga membantu memperkuat dokumentasi realisasi bantuan sehingga proses penyaluran dapat dipantau dan ditelusuri dengan lebih baik.

Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Melalui pemantauan status bantuan secara *real-time*, portal transparansi publik, serta fitur pencarian status bantuan berbasis NIK, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jenis, proses, dan status bantuan secara lebih

mandiri. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap informasi manual, memperkuat pengawasan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah daerah.

Melalui penerapan SIBANTUMAS, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Yapen juga berupaya membangun basis data bantuan sosial yang andal dan terus dimutakhirkan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data lintas program dapat digunakan untuk melihat cakupan penerima, mendeteksi kesenjangan bantuan, mengevaluasi realisasi program, serta mendukung perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial. Dengan informasi yang lebih terstruktur, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, tujuan akhir SIBANTUMAS adalah mewujudkan pengelolaan bantuan sosial yang digital, terpadu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan, memperkuat pengawasan dan pelaporan, serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Dinas Sosial. Dengan pelaksanaan yang konsisten, SIBANTUMAS diharapkan dapat memperkuat efektivitas program perlindungan sosial sekaligus mendukung upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. MANFAAT

Inovasi SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat) memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat penerima bantuan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan program bantuan sosial. Pertama, dari sisi masyarakat, SIBANTUMAS membantu memastikan proses penyaluran bantuan berlangsung lebih tepat jenis, tepat sasaran, dan tepat waktu. Melalui satu portal terpadu, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jenis bantuan, kriteria penerima, proses pengusulan, serta status bantuan tanpa harus mendatangi berbagai bidang atau unit pelayanan secara terpisah.

Kedua, dari sisi ketepatan penyaluran, SIBANTUMAS memberikan manfaat melalui konsolidasi data penerima dari berbagai program bantuan sosial ke dalam satu basis data terpusat. Integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data kependudukan membantu proses verifikasi kelayakan penerima sekaligus mencegah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih bantuan lintas program. Dengan data yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat mengarahkan bantuan tunai, sembako, bahan bangunan, program pemberdayaan, maupun bantuan pasca-bencana kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ketiga, manfaat SIBANTUMAS juga dirasakan oleh pemerintah daerah melalui peningkatan efisiensi pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan bantuan sosial. Digitalisasi proses pengusulan, verifikasi, penetapan, hingga realisasi membantu mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang memerlukan waktu lebih lama dan rentan kesalahan. Penggunaan aplikasi mobile dengan bukti foto dan geotag juga memperkuat dokumentasi lapangan sehingga realisasi bantuan dapat dipantau dan

ditelusuri dengan lebih baik. Data tersebut sekaligus mempermudah penyusunan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi program lintas bidang.

Keempat, SIBANTUMAS memberikan manfaat dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan sosial. Pemantauan status secara *real-time*, portal transparansi publik, dan fitur pencarian berbasis NIK memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau proses bantuan secara lebih mandiri. Bagi Inspektorat, BPK, dan pemangku kepentingan lainnya, sistem ini membantu menyediakan informasi yang lebih terstruktur untuk mendukung pengawasan terhadap proses penyaluran dan penggunaan anggaran bantuan sosial. Keterbukaan tersebut juga dapat membantu mengurangi potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah daerah.

Terakhir, SIBANTUMAS memberikan manfaat jangka panjang dalam mendukung perencanaan program perlindungan sosial dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data. Basis data penerima yang terus dimutakhirkan memungkinkan Dinas Sosial melihat cakupan bantuan, mengenali kesenjangan antarprogram, serta menentukan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Dengan demikian, SIBANTUMAS tidak hanya mempermudah administrasi penyaluran bantuan, tetapi juga memperkuat efektivitas perencanaan dan penganggaran program sosial, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat) lahir sebagai respons Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap pengelolaan bantuan sosial yang masih tersebar, beragamnya jenis dan sumber bantuan, risiko tumpang tindih penerima, serta belum terpadunya proses pengusulan, verifikasi, penyaluran, dan pelaporan. Proses penciptaan inovasi ini diawali melalui audit dan analisis kebutuhan data dari seluruh bidang pengelola bantuan sosial, disertai pengumpulan serta konsolidasi data awal penerima dari berbagai program. Dengan permasalahan yang telah teridentifikasi secara jelas, SIBANTUMAS dapat diarahkan langsung pada pembangunan sistem digital yang menyatukan berbagai proses bantuan sosial dalam satu platform terpadu.

Kecepatan penciptaan SIBANTUMAS didukung oleh pembentukan Tim Inovasi yang melibatkan Dinas Sosial, BPBD, DPMK, pemerintah distrik dan kampung, serta OPD pengampu program bantuan terkait. Tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun spesifikasi teknis, desain arsitektur sistem, serta kebutuhan basis data yang mampu mengakomodasi berbagai jenis program bantuan. Pengembangan kemudian dilanjutkan melalui pembangunan basis data, backend, aplikasi web, dan aplikasi mobile Android. Pola tersebut memungkinkan inovasi dikembangkan secara bertahap tetapi tetap terarah sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

Pelaksanaan inovasi juga ditunjang oleh adanya dasar regulasi yang mendukung pengelolaan kesejahteraan sosial, keterbukaan informasi publik, serta digitalisasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 menjadi landasan dalam pengembangan inovasi. Dukungan regulasi tersebut memperkuat arah penciptaan SIBANTUMAS sebagai sistem pelayanan bantuan sosial yang digital, transparan, dan akuntabel.

Kecepatan implementasi SIBANTUMAS juga didukung oleh tahapan pengembangan yang terstruktur mulai dari uji coba internal, pengisian data awal, uji coba pengguna, hingga peluncuran aplikasi web dan Android. Setelah sistem dikembangkan, petugas lapangan dan perwakilan bidang terkait melakukan beta testing untuk memperoleh umpan balik sebelum sistem diterapkan secara lebih luas. Pemanfaatan formulir digital, aplikasi mobile, bukti foto dan geotag, pemantauan status bantuan secara *real-time*, serta portal transparansi publik membantu mempercepat alur dari proses pengusulan hingga realisasi bantuan.

Dengan kombinasi permasalahan yang telah terpetakan, dukungan lintas perangkat daerah, tahapan pengembangan sistem yang jelas, serta pemanfaatan teknologi digital, SIBANTUMAS memiliki pola penciptaan inovasi yang relatif cepat dan mudah dikembangkan secara bertahap. Inovasi ini mengintegrasikan konsolidasi data, pengusulan, verifikasi, penetapan, pemantauan status, pelaporan lapangan, dan transparansi publik dalam satu rangkaian layanan bantuan sosial. Melalui pendekatan tersebut, SIBANTUMAS dapat berkembang sebagai solusi daerah yang responsif dalam mempercepat proses bantuan, meningkatkan ketepatan sasaran, mengurangi duplikasi penerima, serta memperkuat tata kelola program perlindungan sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Inovasi SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat) memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam mengintegrasikan pengelolaan berbagai jenis bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen. Teknologi digunakan untuk menyatukan data penerima, proses pengusulan, verifikasi, penetapan, pemantauan status, hingga pelaporan realisasi bantuan dalam satu sistem digital. Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan bantuan yang sebelumnya tersebar pada berbagai bidang dan format dapat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan mudah dipantau.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi dilakukan melalui pengembangan aplikasi berbasis web dan aplikasi mobile Android. Sistem ini didukung oleh basis data terpusat yang mampu mengakomodasi berbagai jenis program bantuan sosial serta menghubungkan informasi penerima dari berbagai bidang. Data tersebut juga diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data kependudukan untuk membantu proses validasi kelayakan penerima serta mendeteksi potensi duplikasi bantuan lintas program. Dengan mekanisme tersebut, proses penetapan penerima dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih terpadu.

Teknologi informasi dalam SIBANTUMAS juga mendukung digitalisasi alur pengusulan dan verifikasi bantuan sosial. Pengusulan dari tingkat kampung atau distrik dapat dilakukan melalui formulir dan berkas digital sehingga mengurangi ketergantungan terhadap proses berbasis kertas. Petugas lapangan juga dapat memanfaatkan aplikasi mobile dalam melakukan verifikasi dan pelaporan dengan menyertakan bukti foto serta geotag. Data hasil verifikasi tersebut menjadi bagian dari dokumentasi yang membantu memastikan proses realisasi bantuan dapat ditelusuri dengan lebih baik.

Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan status bantuan dipantau secara *real-time* oleh petugas maupun masyarakat. Melalui portal transparansi publik dan fitur pencarian berbasis NIK, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jenis bantuan, proses pengusulan, serta perkembangan status bantuan tanpa harus datang langsung ke berbagai unit pelayanan. Mekanisme ini membantu meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penyampaian informasi secara manual atau lisan.

Selain mendukung pelayanan kepada masyarakat, teknologi informasi dalam SIBANTUMAS juga memperkuat fungsi pengawasan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. Basis data lintas program dapat digunakan untuk melihat cakupan penerima, mendeteksi penerima ganda, memantau realisasi bantuan, serta mengidentifikasi kesenjangan program. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Dinas Sosial dalam menyusun laporan, melakukan evaluasi, mendukung pengawasan oleh pemangku kepentingan, serta merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih berbasis data.

Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam SIBANTUMAS menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola bantuan sosial yang lebih digital, terpadu, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan aplikasi web, aplikasi mobile Android, basis data terpusat, integrasi DTKS dan data kependudukan, bukti foto dan geotag, pemantauan *real-time*, serta portal transparansi publik membantu mempercepat proses pelayanan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran dan kualitas pengawasan. Pendekatan tersebut mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta memperkuat efektivitas program perlindungan sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat) memperkenalkan pendekatan baru dalam pengelolaan bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengintegrasikan berbagai jenis program bantuan ke dalam satu sistem digital terpadu. Kebaruan utama inovasi ini terletak pada konsolidasi data penerima bantuan yang sebelumnya tersebar di berbagai bidang dan format menjadi satu basis data terpusat. Pendekatan tersebut memungkinkan pengelolaan bantuan tunai, sembako, bahan bangunan, program pemberdayaan, hingga bantuan pasca-bencana dilakukan dalam satu sistem yang lebih terstruktur dan mudah dipantau.

Berbeda dengan pola sebelumnya yang masih mengelola bantuan secara terpisah pada masing-masing bidang, SIBANTUMAS dirancang sebagai sistem lintas program yang mampu melakukan penyandingan data penerima secara otomatis. Integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data kependudukan membantu proses validasi kelayakan sekaligus mendeteksi potensi penerima ganda antarprogram. Kebaruan ini membantu pemerintah mengurangi risiko tumpang tindih bantuan serta meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Keunikan lain dari SIBANTUMAS terletak pada pembentukan basis data kemiskinan yang terus dapat dimutakhirkan melalui proses verifikasi lapangan digital. Petugas dapat menggunakan aplikasi mobile Android untuk melakukan verifikasi dan pelaporan dengan menyertakan bukti foto serta geotag sebagai bagian dari dokumentasi realisasi bantuan. Pola ini mengubah proses pemutakhiran yang sebelumnya banyak bergantung pada pencatatan manual menjadi mekanisme yang lebih dinamis dan terdokumentasi. Dengan demikian, data penerima tidak hanya menjadi data statis, tetapi dapat terus diperbarui sesuai kondisi di lapangan.

Kebaruan SIBANTUMAS juga terlihat pada penerapan transparansi lintas program melalui portal publik dan fitur pencarian status bantuan berbasis NIK. Masyarakat dapat memantau berbagai jenis bantuan yang diterima dalam satu portal tanpa harus mencari informasi ke berbagai bidang secara terpisah. Pemantauan status secara *real-time* juga memberikan kemudahan bagi petugas dan masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses pengusulan hingga realisasi bantuan. Mekanisme tersebut memperkuat keterbukaan informasi sekaligus mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan sosial.

Dengan menggabungkan basis data lintas program, integrasi DTKS dan data kependudukan, deteksi duplikasi penerima, aplikasi web dan mobile, verifikasi berbasis foto dan geotag, pemantauan *real-time*, serta portal transparansi publik, SIBANTUMAS menjadi model pengelolaan bantuan sosial yang lebih terpadu dan berbasis data. Sistem ini tidak hanya membantu memperbaiki proses administrasi dan penyaluran bantuan, tetapi juga menyediakan informasi lintas program untuk mengidentifikasi kesenjangan

cakupan bantuan serta mendukung pengambilan kebijakan. Dengan karakter tersebut, SIBANTUMAS memperkuat tata kelola bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat) disusun sebagai respons atas masih tersebar data penerima bantuan sosial, beragamnya jenis dan sumber bantuan, risiko duplikasi penerima, serta belum terintegrasinya proses pengusulan, verifikasi, penyaluran, dan pelaporan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini dirancang dengan pendekatan sistem digital terpadu yang menghubungkan data penerima, proses administrasi bantuan, verifikasi lapangan, pemantauan status, pelaporan realisasi, dan transparansi publik dalam satu platform. Melalui desain tersebut, pengelolaan bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, transparan, dan mudah dipantau.

Langkah awal dalam desain SIBANTUMAS dimulai melalui pembentukan Tim Inovasi yang melibatkan Dinas Sosial, BPBD, DPMK, pemerintah distrik dan kampung, serta OPD pengampu program bantuan terkait. Pada tahap ini dilakukan audit dan analisis kebutuhan data dari seluruh bidang pengelola bantuan sosial, penyusunan spesifikasi teknis, serta pengumpulan dan konsolidasi data awal penerima. Data dari berbagai program bantuan kemudian dihimpun dalam satu basis data terpusat yang dirancang untuk mendukung berbagai jenis bantuan sosial. Integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data kependudukan digunakan untuk membantu validasi kelayakan penerima serta mencegah terjadinya duplikasi lintas program.

Tahap berikutnya dirancang melalui pengembangan sistem berbasis web dan aplikasi mobile Android untuk mendukung proses pengusulan, verifikasi, penetapan, dan pelaporan bantuan secara digital. Pengusulan dari tingkat kampung dan distrik dilakukan melalui formulir serta berkas digital, sedangkan petugas lapangan dapat melakukan verifikasi menggunakan aplikasi mobile dengan bukti foto dan geotag. Sistem juga menyediakan mekanisme pemantauan status bantuan secara *real-time* sehingga perkembangan proses dari pengusulan hingga realisasi dapat diketahui secara lebih cepat. Pola ini menggantikan sebagian besar proses manual yang sebelumnya bergantung pada berkas kertas dan pencatatan terpisah.

Desain SIBANTUMAS juga memperkuat aspek transparansi dan akses informasi bagi masyarakat. Portal transparansi publik dan fitur pencarian status bantuan berbasis NIK memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai jenis bantuan, status pengusulan, dan realisasi bantuan dalam satu kanal. Pada sisi pemerintah, basis data lintas program dapat digunakan untuk melihat cakupan penerima, mendeteksi tumpang tindih bantuan, serta mengidentifikasi kesenjangan program. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga mendukung pengawasan dan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data.

Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam desain inovasi untuk memastikan SIBANTUMAS terus berkembang sesuai kebutuhan. Setelah melalui uji coba

internal dan uji coba pengguna, masukan dari petugas lapangan serta bidang terkait digunakan untuk memperbaiki sistem sebelum implementasi yang lebih luas. Pada tahap operasional, pemeliharaan rutin, perbaikan bug, peningkatan keamanan, serta pengembangan modul baru dilakukan sesuai perkembangan program bantuan sosial. Dengan desain tersebut, SIBANTUMAS menjadi sistem yang menggabungkan konsolidasi data, aplikasi web dan mobile, verifikasi digital, pemantauan *real-time*, transparansi publik, serta evaluasi berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kepulauan Yapen.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman operasional dalam pelaksanaan inovasi SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ruang lingkup SOP mencakup tahap pengumpulan dan konsolidasi data penerima, pengusulan bantuan, verifikasi kelayakan, validasi data, penetapan penerima, pemantauan status bantuan, pelaporan realisasi, pemutakhiran data, penggunaan aplikasi web dan mobile, penyediaan informasi publik, monitoring, evaluasi, hingga pengembangan sistem secara berkelanjutan.

2. Peran dan Tanggung Jawab

- a. **Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Yapen:** Bertindak sebagai koordinator pelaksanaan inovasi, mengelola sistem SIBANTUMAS, mengonsolidasikan data penerima bantuan, mengoordinasikan proses pengusulan, verifikasi, penetapan, penyaluran, pelaporan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- b. **Tim Inovasi SIBANTUMAS:** Mendukung perencanaan, pengembangan, pengujian, implementasi, serta pengembangan berkelanjutan sistem bersama unsur Dinas Sosial, BPBD, DPMK, pemerintah distrik dan kampung, serta OPD pengampu program bantuan terkait.
- c. **Pemerintah Distrik dan Kampung:** Mendukung proses pengusulan calon penerima, penyampaian data dan berkas yang diperlukan, verifikasi awal sesuai kondisi masyarakat, serta koordinasi dengan Dinas Sosial dalam pemutakhiran data bantuan.
- d. **OPD Pengampu Program Bantuan:** Menyampaikan data program dan penerima bantuan yang dikelola, mendukung sinkronisasi data lintas program, serta menggunakan informasi dalam SIBANTUMAS untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan.
- e. **Petugas Lapangan:** Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima menggunakan aplikasi mobile, melengkapi dokumentasi berupa foto dan geotag, serta melaporkan hasil verifikasi dan realisasi bantuan melalui sistem.
- f. **Masyarakat/Penerima Bantuan:** Menyampaikan data dan informasi yang diperlukan secara benar, mengikuti proses verifikasi, serta memanfaatkan portal transparansi dan fitur pencarian status bantuan untuk memperoleh informasi layanan.

3. Sumber Daya yang Diperlukan

- a. Aplikasi SIBANTUMAS berbasis web untuk pengelolaan data, proses administrasi, pemantauan, dan pelaporan bantuan sosial.
- b. Aplikasi mobile Android untuk mendukung verifikasi dan pelaporan lapangan.
- c. Basis data terpusat yang mampu mengakomodasi berbagai jenis program bantuan sosial.
- d. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data kependudukan sebagai bahan validasi kelayakan penerima.
- e. Perangkat komputer, telepon seluler, dan perangkat digital pendukung.
- f. Jaringan internet sesuai ketersediaan pada wilayah pelaksanaan.
- g. SDM Dinas Sosial, petugas lapangan, pemerintah distrik dan kampung, serta OPD pengampu program bantuan yang terlibat dalam pelaksanaan.
- h. Portal transparansi publik dan fitur pencarian status bantuan berbasis NIK.

4. Proses Pengumpulan Ide

SIBANTUMAS berawal dari identifikasi permasalahan pengelolaan bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama data penerima yang tersebar di berbagai bidang dan format, risiko tumpang tindih penerima, proses pengusulan dan verifikasi yang masih manual, serta belum tersedianya mekanisme pemantauan status bantuan secara terpusat. Ide kemudian dikembangkan menjadi platform digital lintas program yang mengintegrasikan basis data penerima, pengusulan, verifikasi, penetapan, pemantauan status, pelaporan realisasi, serta transparansi publik dalam satu sistem.

5. Seleksi dan Penilaian Ide

Kriteria penilaian meliputi:

- a. Kemampuan inovasi dalam mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial dalam satu sistem.
- b. Kemampuan meningkatkan akurasi dan keterpaduan data penerima bantuan.
- c. Kemampuan mendeteksi dan mencegah duplikasi penerima lintas program.
- d. Kemampuan mendukung verifikasi kelayakan penerima secara lebih cepat dan terstruktur.
- e. Kemampuan memanfaatkan aplikasi web dan mobile dalam proses pengelolaan bantuan.
- f. Kemampuan menyediakan pemantauan status bantuan secara *real-time*.
- g. Kemampuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui portal publik.
- h. Kemampuan menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

6. Pengendalian Risiko dan Kualitas

Risiko seperti data penerima yang tidak lengkap, duplikasi data, kesalahan verifikasi, keterlambatan pembaruan informasi, keterbatasan jaringan internet, ketidaksesuaian dokumentasi lapangan, serta gangguan pada sistem diantisipasi dengan:

- a. Melakukan konsolidasi data penerima dari seluruh program bantuan sosial secara terstruktur.

- b. Melakukan penyandingan dengan DTKS dan data kependudukan untuk membantu validasi kelayakan dan pencegahan duplikasi.
- c. Melakukan verifikasi lapangan melalui aplikasi mobile dengan bukti foto dan geotag.
- d. Memutakhirkan data secara berkala berdasarkan hasil verifikasi dan perubahan kondisi penerima.
- e. Melakukan uji coba internal dan uji coba pengguna sebelum penerapan sistem secara penuh.
- f. Melaksanakan pemeliharaan rutin, perbaikan bug, dan peningkatan keamanan sistem.
- g. Melakukan pelatihan kepada petugas pengelola bantuan dan tim lapangan.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas data, proses pelayanan, serta kendala pelaksanaan.

7. Uji Coba dan Penerapan Awal

Pelaksanaan awal SIBANTUMAS dilakukan melalui uji coba internal atau *alpha testing* oleh tim pengembang setelah basis data, backend, aplikasi web, dan aplikasi mobile selesai dikembangkan. Tahap berikutnya dilakukan *beta testing* oleh petugas lapangan dan perwakilan bidang terkait dengan menggunakan data awal penerima dan jenis bantuan yang telah dikonsolidasikan. Umpan balik yang diperoleh dari proses uji coba digunakan untuk melakukan perbaikan sistem sebelum SIBANTUMAS diterapkan secara lebih luas.

8. Implementasi dan Pengembangan

- a. Mengumpulkan dan mengonsolidasikan data penerima dari berbagai jenis program bantuan sosial.
- b. Mengintegrasikan data dengan DTKS dan data kependudukan untuk membantu proses validasi.
- c. Menerima pengusulan bantuan dari tingkat kampung dan distrik melalui formulir serta berkas digital.
- d. Melakukan verifikasi kelayakan penerima melalui sistem dan verifikasi lapangan.
- e. Mendokumentasikan hasil verifikasi dengan bukti foto dan geotag melalui aplikasi mobile.
- f. Menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan program.
- g. Memantau perkembangan status bantuan dari proses pengusulan hingga realisasi secara *real-time*.
- h. Menyampaikan informasi status bantuan melalui portal transparansi publik dan fitur pencarian berbasis NIK.
- i. Mencatat realisasi bantuan dan memperbarui basis data penerima secara berkelanjutan.
- j. Melakukan pemeliharaan sistem, perbaikan bug, peningkatan keamanan, serta pengembangan modul baru sesuai kebutuhan program.

9. Komunikasi Internal dan Eksternal

a. **Internal:** Koordinasi dilakukan antara Dinas Sosial, Tim Inovasi SIBANTUMAS, BPBD, DPMK, OPD pengampu program bantuan, pemerintah distrik dan kampung, serta petugas lapangan untuk memastikan konsolidasi data, verifikasi, penetapan, pemantauan, dan pelaporan berjalan sesuai mekanisme.

b. **Eksternal:** Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat penerima dan masyarakat umum mengenai jenis bantuan sosial, proses pengusulan, kriteria penerima, penggunaan portal transparansi, fitur pencarian berbasis NIK, serta mekanisme pemantauan status bantuan melalui SIBANTUMAS.

10. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan secara berkala dengan indikator:

- a. Tingkat kelengkapan dan akurasi data penerima bantuan sosial dalam basis data terpusat.
- b. Jumlah data penerima lintas program yang berhasil dikonsolidasikan.
- c. Jumlah atau potensi duplikasi penerima yang berhasil teridentifikasi.
- d. Kecepatan proses pengusulan, verifikasi, penetapan, hingga realisasi bantuan.
- e. Kelengkapan hasil verifikasi lapangan dengan bukti foto dan geotag.
- f. Persentase laporan realisasi bantuan yang tercatat melalui SIBANTUMAS.
- g. Tingkat pemutakhiran data penerima berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
- h. Tingkat pemanfaatan portal transparansi dan fitur pencarian status bantuan oleh masyarakat.
- i. Tingkat keterlibatan Dinas Sosial, OPD terkait, pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan petugas lapangan dalam pengelolaan sistem.
- j. Perkembangan efektivitas program bantuan sosial dan dukungannya terhadap upaya penanggulangan kemiskinan sebagai indikator jangka panjang.

SOP ini menjadi pedoman agar pelaksanaan SIBANTUMAS berlangsung secara sistematis, terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui alur kerja yang jelas mulai dari konsolidasi data, pengusulan, verifikasi, penetapan penerima, pemantauan status, pelaporan realisasi, hingga pemutakhiran data dan evaluasi, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, mencegah duplikasi penerima, mempercepat proses pelayanan, serta memperkuat tata kelola program bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB III

PENUTUP

Pengelolaan bantuan sosial yang efektif tidak cukup hanya berfokus pada proses penyaluran, tetapi juga memerlukan sistem yang mampu menjamin ketepatan sasaran, keterpaduan data, transparansi, serta kemudahan pemantauan dari tahap pengusulan hingga realisasi. Inovasi SIBANTUMAS (Sistem Informasi Bantuan Masyarakat) menjadi salah satu langkah strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Yapen dalam membangun tata kelola bantuan sosial yang lebih digital, terintegrasi, efisien, dan akuntabel.

Pendekatan SIBANTUMAS menunjukkan bahwa konsolidasi data dan digitalisasi proses memiliki peran penting dalam memperbaiki pengelolaan berbagai jenis bantuan sosial. Melalui satu basis data terpusat yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data kependudukan, proses validasi kelayakan penerima dapat dilakukan secara lebih terstruktur sekaligus membantu mencegah duplikasi penerima lintas program. Pengusulan dan verifikasi juga didukung melalui formulir digital, aplikasi mobile Android, bukti foto, dan geotag sehingga proses lapangan dapat terdokumentasi dan ditelusuri dengan lebih baik.

Inovasi ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat transparansi dan keterbukaan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pemantauan status bantuan secara *real-time*, portal transparansi publik, dan fitur pencarian berbasis NIK, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jenis, proses, dan status bantuan melalui satu kanal yang lebih mudah diakses. Di sisi pemerintah, data lintas program dapat digunakan untuk memantau cakupan bantuan, melihat kesenjangan program, menyusun laporan pertanggungjawaban, serta mendukung pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data.

Oleh karena itu, keberlanjutan SIBANTUMAS perlu didukung melalui konsistensi pemutakhiran data, peningkatan kapasitas petugas, penguatan koordinasi antara Dinas Sosial, BPBD, DPMK, pemerintah distrik dan kampung, serta OPD pengampu program bantuan terkait. Pemeliharaan aplikasi, perbaikan bug, peningkatan keamanan sistem, dan pengembangan modul baru juga perlu dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan. Monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk menilai akurasi data, kecepatan proses pengusulan hingga realisasi, pemanfaatan portal publik, kualitas pelaporan, serta efektivitas sistem dalam mendukung pengelolaan bantuan sosial.

Dengan semangat memperkuat tata kelola bantuan sosial berbasis teknologi dan data, SIBANTUMAS diharapkan berkembang menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini tidak hanya membantu mempercepat dan mengefisienkan proses bantuan, tetapi juga memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial pemerintah daerah. Dengan pelaksanaan yang konsisten, SIBANTUMAS diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang semakin tepat sasaran di Kabupaten Kepulauan Yapen.



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**